

**PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 (STUDI KASUS DRAINASE
JL SALEH ABBAS PASAR BAWAH)**

Oleh : Nova Wulandari

Email : Novawulandarii12@gmail.com

Pembimbing : Drs. Erman.M, M.Msi

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The drainage system is a way of removing excess unwanted water in an area. With the drainage system, excess water can be channeled into the drainage channel. When the rainy season arrives, there will be puddles or flooding on the roads and also inundate the market area below. One of the factors in the occurrence of inundation is high rainfall, clogged drainage channels and cannot function properly. From this problem, it is necessary to manage damaged / problematic drainage channels so that the water flow can flow properly.

This research was conducted with the aim of describing the management of the drainage system in Pasar Bawah Jl Saleh Abbas in 2018. This research is a case study research with a qualitative approach. The location of this research is the Public Works and Spatial Planning Office of Pekanbaru City. The data collection techniques used were interviews and documentation. The data analysis technique used is qualitative data analysis.

The results of the study concluded that the Drainage System Management has not been running optimally, this is due to the unclear field responsible for handling this drainage problem and the absence of a special activity program so that the process in the activities carried out cannot be completed.

Keywords: Management, drainage system

PENDAHULUAN

Hujan bagi beberapa wilayah di Indonesia yang beriklim tropis bisa jadi merupakan anugrah tersendiri bagi masyarakatnya, namun pada beberapa wilayah perkotaan hujan bisa menjadi masalah atau bahkan musibah dikarenakan air hujan yang menggenang tidak dapat mengalir dengan baik sehingga menyebabkan banjir. Salah satu alasan hal ini dapat terjadi dikarenakan sistem drainase pada wilayah perkotaan tidak berfungsi dengan baik, rata-rata saluran tertutup oleh paving block bangunan ruko dan permukiman, sehingga air hujan dapat menggenang cukup dalam, serta disepanjang saluran drainase terdapat gorong-gorong yang kurang berfungsi dan juga ditambah sedimentasi dan penumpukan sampah.

Kota memerlukan adanya suatu sistem Drainase. Yang bertujuan untuk menyediakan suatu sistem saluran yang berfungsi mengalirkan air di permukaan akibat hujan secepatnya ke badan air penerima terdekat seperti sungai. Semakin banyak jumlah penduduk di perkotaan maka semakin pesatlah pembangunan berbagai prasarana dan sarana perkotaan.

Drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase bermakna sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas, dimana drainase suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak di inginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut.¹

Dari sudut pandang yang lain, drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam

rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana drainase disini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan atau bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air dan banjir.²

Pengelolaan Drainase merupakan proses suatu pemeliharaan saluran drainase agar tidak terjadi permasalahan. Perlu adanya pengelolaan yang dapat di anggap sebagai aktivitas untuk pemeliharaan hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Seperti yang telah terjadi di Kota Pekanbaru di berbagai jalan memiliki sistem drainase yang buruk yang tidak berjalan dengan baik maka perlunya pengelolaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru agar sistem drainase tersebut dapat di kelola oleh pemerintah agar tidak terjadi permasalahan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 ayat 6 UU No.23 Ta.2014).

Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang dimaksud dengan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah³ :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang

² Ibid.,

³ Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 12 tentang pemerintahan daerah

¹ Suripin, *sistem drainase yang berkelanjutan*,. Yogyakarta: Penerbit Andy , 2004, hlm 7

- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
- f. Sosial

Sebagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Pekanbaru, maka perlu adanya pengelolaan dari Dinas PUPR serta membersihkan sampah yang menyumpat drainase.

Berkaitan dengan sampah dapat menjadi masalah kalau tidak dikelola dengan baik. Terlihat di tepian jalan/ drainase terdapat penumpukan sampah serta masuk nya sampah kedalam saluran drainase disini terlihat juga perlu koordinasi dengan Dinas lingkungan hidup dan kebersihan agar dapat disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.

Di Pekanbaru permasalahan yang terjadi akibat buruknya sistem drainase, hal ini mengingat adanya kendala pembangunan fisik drainase yang masih meliputi wilayah kerja kabupaten/kota, propinsi dan pemerintah pusat. Dampak dari pembangunan drainase yang terputus-putus, yang menyebabkan aliran air tidak sampai pada pembuangan yang seharusnya. Selain masih banyaknya persoalan yang disebabkan buruknya sistem dan konsep pembangunan drainase, minimnya daerah resapan air akibat semenisasi yang dilakukan pemilik-pemilik bangunan pertokoan menjadi penyebab kerap terjadinya banjir perkotaan. pembangunan drainase yang tidak memberikan ruang bagi resapan air yang lewat. Kanan kiri dan bawah di cor hingga tak ada air yang terserap ke tanah. Akhirnya sampai diujung drainase air akan menggenang⁴.

⁴ portalgreenradio.com. pekanbaru langganan banjir pembangunan sistem drainase harus interkoneksi. 2 februari 2017 (<http://portalgreenradio.com/j-page/245-pekanbaru-langganan-banjir-pembangunan-sistem-drainase-harus-interkoneksi>)

Permasalahan ini sudah terjadi di Pasar Bawah Pekanbaru awal pekan kemaren, tidak serta merta karena kondisi base ment pasar rendah, dari jalan sekitar gedung. Tapi lebih dari itu, karena buruknya sistem drainase, yang ada dilingkungan pasar, drainase yang dibuat tidak seimbang dengan debit air yang datang jika musim hujan serta drainase kecil dan tidak berfungsi dengan baik.⁵

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan Sistem Drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Tahun 2018 (Studi Kasus Drainase JL Saleh Abbas Pasar Bawah) ?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sistem Drainase Tahun 2018 (Studi Kasus Drainase JL Saleh Abbas Pasar Bawah) ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Sistem Drainase yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru tahun 2018 (Studi Kasus Drainase JL Saleh Abbas Pasar Bawah)
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang di hadapi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam pengelolaan Sistem Drainase tahun 2018 (Studi

⁵ Pekanbaru.tribunnews.com. warga minta drainase sekitar pasar bawah diperbesar ini alasannya. 1 Agustus 2018. (<http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/08/01/warga-minta-drainase-sekitar-pasar-bawah-diperbesar-ini-alasannya>)

Tinjauan Teori

Manajemen Pemerintahan

Istianto Mengatakan bahwa Manajemen Pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan.⁶

Menurut Ndraha manajemen (pengelolaan) pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan “tata kelola” atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen pada intinya adalah “ bagaimana menciptakan effectiveness usaha (“doing right things”) secara efficient (“doing things right”) dan produktif, melalui fungsi dan skill tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan⁷.

Muhammad Ryaas Rasyid mengemukakan bahwa manajemen pemerintahan diarahkan agar terlebih dulu mendefinisikan “hasil apa” yang ingin dicapai dengan uang, peralatan, keahlian, dan tenaga kerja yang dikerahkan. Ia berhubungan dengan target yang ingin dicapai oleh setiap unit dalam suatu periode tertentu. Manajemen pemerintahan juga menganut prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, dan inovasi dalam proses menghimpun dan menggerakkan orang-orang, memperoleh dan menggunakan uang

serta mengadakan, mempergunakan, dan memelihara peralatan demi tercapainya tujuan organisasi.⁸

Fungsi Manajemen Pemerintahan

Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan:⁹

1. Perencanaan Pemerintahan
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan
4. Kontrol pemerintahan

Seperti sistem manajemen pada umumnya, manajemen pemerintahan juga menganut prinsip-prinsip umum dari manajemen. Misalnya prinsip efektivitas, efisiensi, dan inovasi dalam proses menghimpun dan menggerakkan orang-orang, memperoleh dan menggunakan uang, serta mengadakan, menggunakan dan memelihara peralatan dan masih banyak lagi yang harus dijalankan dalam proses pemerintahan itu. Semua proses pemerintahan itu dijalankan dengan senantiasa menggunakan sejumlah prinsip-prinsip dasar dan teknik-teknik manajemen sebagai dasar acuannya. Dan lagi-lagi semua itu ujung nya adalah tercapainya tujuan organisasi, dalam hal ini adalah tujuan pemerintahan.¹⁰

Manajemen pemerintahan daerah yang baik haruslah berbasis kinerja dalam otonomi daerah, manajemen pemerintahan daerah selain berbasis kinerja, harus pula berbasis transparansi dan akuntabilitas. Manajemen yang efisien berarti segala kegiatan yang menggunakan input yang menghasilkan output dengan biaya produksi

⁶ DR. Bambang Istianto HP M.si, Manajemen Pemerintahan dalam perspektif pelayanan publik, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011, hlm 29

⁷ Taliziduhu Ndraha, Kybernology (ilmu pemerintahan baru) jilid 1, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm 159

⁸ Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan (tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan), Jakarta: Mutiara Sumber Widy, 2000, hlm 148-149

⁹ Taliziduhu Ndraha, Kybernology (ilmu pemerintahan baru) jilid 1, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm 160

¹⁰ Zaidan Nawawi, Manajemen pemerintahan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 22

terendah, atau dikatakan tidak terjadi pemborosan. Manajemen yang efisien dan efektif dikatakan sebagai manajemen berkinerja tinggi. Manajemen yang efektif diartikan mampu mencapai hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, yang diukur dengan cara membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target yang direncanakan.¹¹

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Di dalam penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1 Pengelolaan Sistem Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Tahun 2018 (Studi Kasus Drainase JL Saleh Abbas Pasar Bawah)

Penyelenggaraan pengelolaan sistem drainase dilakukan untuk upaya mengalirkan air yang berasal dari air hujan agar tidak terjadi genangan yang berlebihan pada suatu kawasan.

Menurut Ndraha manajemen (pengelolaan) pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan “tata kelola” atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen pada intinya adalah “ bagaimana menciptakan effectiveness usaha (“doing right things”) secara efficient (“doing things right”) dan produktif, melalui fungsi dan skill tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup kegiatan manajemen pemerintahan terlihat melalui fungsi-fungsi manajemen meliputi :

1. Perencanaan pemerintahan
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan
3. Penggunaan sumber-sumber daya pemerintahan
4. Kontrol pemerintahan

a. Perencanaan Pemerintahan dalam Pengelolaan Sistem Drainase (Studi Kasus Drainase JL Saleh Abbas Pasar Bawah)

Di dalam pengelolaan perlu adanya perencanaan akan memberikan arah dan tujuan yang jelas yang hendak di capai. Perencanaan yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sistem drainase agar saluran drainase dapat berjalan dengan baik .

Perencanaan dalam pengelolaan sistem drainase yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru terlebih dahulu dengan membuat kebijakan master plan, juga menuangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Jadi pada RPJM menetapkan untuk 5 tahunan sesuai dengan visi dan misi walikota, sama dengan masa dinas nya walikota pekanbaru.

Namun yang menjadi masalah hingga saat ini sehingga terjadinya banjir dan genangan di Kota Pekanbaru pada titik tertentu adalah mengenai kebijakan master plan untuk keseluruhan di Kota Pekanbaru belum ada.

¹¹ Rahardjo Adisasmita, Manajemen Pemerintahan Daerah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm 4

2 Pengorganisasian Sistem Drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Pengorganisasian merupakan pengaturan tim sesuai dengan yang ditentukan. Penugasan kerja dan pembagian wewenang adalah elemen yang penting dari organisasi. Fokusnya adalah pada pembagian kerja, koordinasi, pemantauan tugas dan arus informasi dalam organisasi.

Mengenai pembentukan organisasi terkait pengelolaan drainase yang mengacu pada SOTK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru belum ada bidang mana yang menangani permasalahan drainase..

3 Penggunaan Sumber Daya Pemerintahan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru)

Penggunaan sumber daya pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru merupakan tindak lanjut dari pengorganisasian terhadap menggerakkan sumber daya organisasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab agar dapat mencapai tujuan dengan perencanaan yang telah ditetapkan terkait pengelolaan sistem drainase.

Dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan yang dilakukan dalam pengelolaan drainase setiap tahunnya dengan melihat dan mengecek dimana saja titik genangan yang parah terkait buruknya sistem drainase, dan dari titik genangan itulah yang harus di selesaikan oleh petugas harian lepas Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan dalam pengelolaan drainase khususnya area pasar bawah sepertinya kurang di perhatikan oleh pemerintah. Berdasarkan pengamatan penulis mengenai drainase di area pasar bawah terlihat drainase kecil yang tertutup oleh semenisasi .

Pengelolaan drainase yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sebagai teknis operasi dan pemeliharaan pada saluran drainase. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Suhaimi Siregar selaku Kepala Seksi Bidang Bina Marga bahwa untuk menjaga drainase itu tetap optimal maka harus dilakukan pemeliharaan.

Tabel 3.2
Kelengkapan Operasi & Pemeliharaan Prasarana dan sarana Drainase

No	Kelengkapan	Kegunaan
1	Mobil Keamanan	Untuk membantu pengamanan pekerjaan di jalan
2	Dump Truck	Untuk mengangkut bahan atau material pekerja dan untuk mengangkat sedimentasi dan sampah
3	Excavator	Untuk menggali sedimen
4	Compressor	Untuk membersihkan area pekerjaan
5	Mobil Bok Terbuka	Untuk mengangkut sedimen dalam volume kecil
6	Cangkul	Untuk menggali tanah, memindahkan tanah
7	Sabit	Untuk

		membabat rumput dan ilalang
8	Penggaruk	Untuk membersihkan sisa potongan rumput di daerah sekitar saluran dan mengangkat sampah dari badan saluran drainase
9	Dan lainnya	

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru akan melakukan normalisasi, jadi pembersihan-pembersihan saluran-saluran drainase di antaranya seperti mengangkat sampah, mengeruk sedimentasi, serta pembabatan rumput di area saluran drainase. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Bagian Bidang Bina Marga dalam pelaksanaannya sudah menjalankan dengan baik tupoksinya yaitu dengan melakukan normalisasi pemeliharaan pada saluran drainase.

4 Kontrol Pemerintahan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru)

Di dalam pengelolaan sistem drainase perlu adanya pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru agar drainase yang telah dibuat selama ini dapat terjaga dan tidak rusak/patah. Di dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 terdapat pada pasal 4 TUPOKSI dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam menyelenggarakan fungsi belum ada pengawasan terkait urusan bidang pekerjaan umum dan tata ruang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru rutin melakukan

pengawasan serta membersihkan sampah yang menyempit pada drainase. Pengawasan ini dilakukan secara berkala terhadap tiap tiap parit.

Dalam hal ini kontrol dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dapat di mulai pada saat pendataan mulai dilakukan, agar dapat mengetahui titik titik dimana saja sistem drainase yang rusak yang mengakibatkan banjir maupun genangan. Maka pada saat itulah pengawasan berlangsung. Dengan adanya pengawasan sehingga dapat untuk menghindari adanya penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan di capai.

mengenai pengawasan terkait permasalahan drainase untuk saat ini belum ada pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, hanya saja terkadang yang bagian bina marga yang ikut turun melihat kondisi drainase

2. Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Tahun 2018 (Studi Kasus Pasar Bawah JL Saleh Abbas)

Sistem drainase merupakan masalah yang rutin terjadi di tiap tahunnya di Kota Pekanbaru, khususnya di Pasar Bawah ini. Saat musim hujan tiba Kota Pekanbaru menjadi banjir maupun tergenang akibat buruknya sistem drainase saat ini. Pemerintah Kota Pekanbaru sudah berupaya mengatasi permasalahan ini tapi belum dapat terselesaikan.

Dalam melaksanakan pengelolaan sistem drainase di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Bawah JL Saleh Abbas) yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru ada beberapa faktor penghambat Pemerintah daerah dalam pengelolaan sistem drainase di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Bawah JL Saleh Abbas) yaitu :

a. Minimnya Anggaran Untuk Pengelolaan Sistem Drainase

Dengan minimnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan dalam pengelolaan sistem drainase yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini di karenakan anggaran dari Pemerintah Kota Pekanbaru hanya tersedia untuk melakukan normalisasi dan pemeliharaan saluran drainase. Tidak adanya pembangunan baru yang menyebabkan kurang maksimalnya kinerja dari saluran dan drainase lama.

b. Pembangunan Pertokoan Yang Tidak Mengindahkan Aturan

Pembangunan pertokoan sangat berpengaruh terhadap sistem drainase, pertokoan yang berada khususnya di area Pasar Bawah saat ini sangat padat, yang penulis lihat pembangunan pertokoan tidak memperhatikan aspek lingkungan, dimana daerah yang menjadi daerah resapan telah banyak berkurang diakibatkan dari pembangunan toko.

Pertokoan yang ada di area pasar bawah yang penulis lihat bahwa pembuatan drainase lebih tinggi dari jalan sehingga air tidak dapat mengalir dengan baik, Sehingga ketika hujan tiba air tidak tertampung dan masuk kedalam drainase maka akan mengakibatkan banjir atau genangan.

c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan

Menjaga lingkungan sangat penting dan juga merupakan kewajiban bagi masyarakat. Lingkungan yang bersih dan terawat akan memberikan kesan yang nyaman dan terbebas dari penyakit. Selain itu lingkungan yang bersih dan terawat akan menghindarkan masyarakat dari bencana seperti banjir. Apabila telah memasuki musim penghujan Kota Pekanbaru selalu di

landa banjir akibat buruknya sistem drainase yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan.

Buruknya sistem drainase yang terjadi di Kota Pekanbaru bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Kota, tetapi masyarakat memiliki peranan penting dalam pengelolaan sistem drainase ini. tersumbatnya saluran drainase akibat dari perilaku buruk masyarakat yang mana masih membuang sampah sembarangan. Pemerintah Kota Pekanbaru tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini jika perilaku buruk membuang sampah sembarangan tidak bisa di rubah.

d. Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk

Tingginya pertumbuhan penduduk menjadi sangat berpengaruh juga. Jumlah penduduk makin lama makin mengalami kenaikan yang sangat pesat, pesatnya perkembangan penduduk apabila tidak diikuti oleh pembangunan yang memadai akan berdampak buruk bagi pemerintah maupun terhadap masyarakat itu sendiri. Jumlah penduduk yang besar harus diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai yang akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jika jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas yang rendah akan menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan.

e. Kurangnya lahan

Sesuai dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan meningkat yang diiringi dengan tumbuhnya pemukiman atau pertokoan yang mengakibatkan penggunaan lahan mempengaruhi terjadinya pada permasalahan drainase yang telah ada, namun drainase yang telah ada belum memadai secara maksimal yang mengakibatkan genangan yang cukup lama.

Di wilayah perkotaan khususnya di Kota Pekanbaru yang sangat pesat sarana dan prasarananya seperti perumahan, tempat rekreasi, jalan, pusat pembelanjaan yang mengakibatkan akan berkurangnya daya serap lahan yang bersangkutan sehingga ketika tiba musim hujan aliran air semakin besar yang mengakibatkan aliran air di permukaan tidak dapat tertampung oleh drainase dan akan berdampak terjadinya genangan maupun banjir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota DPRD Komisi IV Kota Pekanbaru terkait permasalahan drainase sebagai berikut : “ masalah drainase ini menurut saya masyarakat tidak mau memberikan tanahnya untuk memperlebar saluran drainase yang ada sehingga permasalahannya terjadi secara terus menerus dan tidak dapat terselesaikan “ (wawancara 10 Februari 2020)

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat dikemukakan mengenai pengelolaan sistem drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru tahun 2018 (studi kasus Drainase JL Saleh Abbas Pasar Bawah) sebagai berikut :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sistem drainase belum berjalan maksimal, hal ini dikarenakan belum jelasnya bidang yang bertanggung jawab tentang penanganan masalah drainase ini serta belum adanya program kegiatan yang khusus sehingga proses dalam kegiatan yang dilakukan kurang berjalan secara optimal.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memiliki beberapa saran, adapun saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Pentingnya sosialisasi keseluruhan wilayah Kota Pekanbaru terutama di area sekitar Pasar Bawah tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya agar dapat menjaga kebersihan pada saluran drainase. Dengan adanya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan
2. Sebaiknya harus dilakukan pemeliharaan pada saluran drainase dengan melakukan pemantauan pada saluran drainase mana yang sudah dibersihkan oleh petugas harian lepas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmitha, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Azwar, Syaifudin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bungin, Burhan. 2012. *Penelitian Kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan public, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Pranedamedia Group
- Creswell, J.W. 2010. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar
- Hasibuan. 2001. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah (edisi revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moloeng, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Zaidan. 2015. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Rasyid, Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan (Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan)*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya

Salam, Setyawan Dharma. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan

Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suripin. 2004 . *Sistem Drainase yang Berkelanjutan*. Yogyakarta: Penerbit Andy

Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT PERCA

Yunus, Hadi Sabari. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kotemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

page/245-pekanbaru-langganan-banjir-pembangunan-sistem-drainase-harus-interkoneksi.

pekanbaru.tribunnews.com. 2018. Warga Minta Drainase Sekitar Pasar Bawah Di Perbesar Ini Alasannya. <http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/08/01/warga-minta-drainase-sekitar-pasar-bawah-diperbesar-ini-alasannya>.

riausatu.com . 2018. Secara Berkala Pupr Pekanbaru Awasi Dan Bersihkan Sampah Di Drainase.<http://www.riausatu.com/read-4-31545-2019-09-06-secara-berkala-pupr-pekanbaru-awasi-dan-bersihkan-sampah-di-drainase.html>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Perda Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Sumber Internet

Portalgreenradio.com. 2018. Pekanbaru Langanan Banjir Pembangunan Sistem Drainase Harus Interkoneksi. <http://portalgreenradio.com/j->